

PERANAN PRINSIP AKUNTANSI BERTERIMA UMUM DALAM KEPATUHAN PEDOMAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Oleh :

Widi Hidayat

Dosen Fakultas Ekonomi dan Program Pascasarjana
Universitas Airlangga

Abstract

Generally accepted accounting principle included doctrine of accounting are materiality, consistency, objectivity, matching, conservation and accounting assumption are economic entity, going concern, monetary unit, historical cost, periodicity, revenue recognition doctrine of accounting and accounting assumption support by good audit system of corporate governance. Regulatory the objective of system audit good corporate governance regulatory is the appreciated of transparency, accountability. Responsibility of information income statement corporation through the maximalization the value of the firm by shareholder wealth.

Keywords : Generally accepted accounting principles, doctrine accounting. System audit good corporate governance.

Pendahuluan

Sangat jelas bahwa hambatan besar dalam rangka memperoleh kepercayaan investor adalah keprihatinan mereka atas kurangnya penerapan praktik-praktik *good corporate governance* yang sehat. Investor ingin mempercayai bahwa investasi mereka digunakan untuk dan atas kepentingan mereka, bahwa transparansi dan keterbukaan penuh atas hasil usaha perusahaan akan memungkinkan mereka dengan yakin memantau kinerja perusahaan-perusahaan dimana mereka menanamkan modalnya. Dengan pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang baik mereka dapat memastikan bahwa pengurus perusahaan merupakan SDM yang handal dalam meraih kinerja perusahaan yang maksimal. Investor institusional yang mapan menyadari bahwa

implementasi *good corporate governance* menghasilkan peningkatan kualitas dalam pengambilan keputusan dan kinerja keuangan perusahaan.

Ada kebutuhan yang mendesak untuk mengelola kegiatan usaha Indonesia dalam suatu rezim *corporate governance* yang kuat guna meningkatkan kinerja perekonomian dan memulihkan kepercayaan investor. Hanya dengan pulihnya kepercayaan investor tersebut, investasi asing dan domestik yang sangat dibutuhkan akan kembali mengalir.

Perusahaan-perusahaan telah memberikan respon mereka dengan cara menerapkan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik *corporate governance* yang lebih baik. Tindakan ini tidak menempatkan penerapan *corporate governance* sebagai tujuan akhir, akan tetapi perusahaan menyadari bahwa hal tersebut sangat penting untuk mencapai:

1. Peningkatan kinerja perusahaan melalui prosedur pengambilan keputusan yang lebih baik, kegiatan operasi yang lebih efisien, dan pemberian layanan yang lebih baik.
2. Akses terhadap pembiayaan dengan biaya rendah bagi teknologi-teknologi baru, keahlian manajemen, pasar, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya, yang akan meningkatkan nilai perusahaan.
3. Masyarakat investor yang puas karena perusahaan memberikan dividend an nilai perusahaan yang lebih baik atas hasil kinerja keuangan yang meningkat.
4. Kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang dan penciptaan nilai dengan tetap mempertimbangkan kepentingan seluruh *stakeholders*.
5. Sumber pendapatan Pemerintah melalui privatisasi BUMN, serta pembayaran dividend an pajak oleh BUMN.

Sebagaimana terlihat, *corporate governance* bukan hanya permasalahan di Indonesia, tetapi gejala ini semakin terlihat sebagai elemen penting dalam agenda reformasi perusahaan di Asia, Eropa, dan Amerika. Hal ini seiring dengan akan semakin ketatnya persaingan antar perusahaan dalam mendapatkan pendanaan investasi.

Sebagai konsekuensinya, pemerintah Indonesia menyadari bahwa pemerintah harus mendorong reformasi di bidang *corporate governance* guna mereposisi Indonesia di tingkat internasional.

Melalui kebijakan ini, kepercayaan pasar akan pulih dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan dapat dicapai.

Pembahasan

Pedoman *good corporate Governance* disusun oleh **Komite** dengan tujuan agar Pedoman ini menjadi acuan bagi pelaksanaan *Good Corporate Governance* oleh pelaku usaha di Indonesia. Pedoman disusun berdasarkan metode yang memungkinkan terjadinya perbaikan dan penyesuaian standar *Good Corporate Governance* yang lebih konstruktif dan fleksibel bagi perusahaan Indonesia. Dengan demikian pendekatan yang diambil bukan melalui pendekatan yang preskriptif atau pemberlakuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pedoman *Good Corporate Governance* mencakup:

- I. Pemegang Saham
- II. Dewan Komisaris
- III. Direksi
- IV. Sistem Audit
- V. Sekretaris Perusahaan
- VI. Pihak yang Berkepentingan (*Stakeholders*)
- VII. Keterbukaan
- VIII. Kerahasiaan
- IX. Informasi Orang Dalam
- X. Etika Berusaha dan Anti Korupsi
- XI. Donasi
- XII. Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan tentang Proteksi Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Pelestari Lingkungan
- XIII. Kesempatan Kerja yang Sama

Adapun maksud dari prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pedoman adalah:

1. Memaksimalkan nilai Perseroan dan nilai Perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, serta dengan demikian menciptakan iklim yang mendukung investasi.
2. Mendorong pengelolaan perseroan secara professional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong agar pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab social Perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) maupun kelestarian lingkungan disekitar Perseroan.

Secara umum perusahaan (business) adalah suatu organisasi dimana sumber daya (input), seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang atau jasa (output) bagi pelanggan.

Jenis-jenis perusahaan :

1. perusahaan manufaktur (manufacturing)
2. perusahaan dagang (merchandising)
3. perusahaan jasa (service)

Perusahaan manufaktur (manufacturing business) adalah perusahaan yang aktivitasnya mengubah input dasar menjadi produk jadi atau produk setengah jadi yang dapat dijual kepada pelanggan. Perusahaan dagang (merchandising businesses) adalah perusahaan yang tidak memproduksi barang secara langsung tetapi membeli barang dari perusahaan lain dan menjual kembali barang tersebut kepada pelanggan. Perusahaan jasa (service businesses) adalah perusahaan yang menjual jasa bukan barang atau produk kepada pelanggan.

Bentuk Perusahaan

1. Perusahaan Perorangan (proprietorship) adalah perusahaan yang dimiliki secara perorangan. Kelebihan : pengelolaannya mudah, biaya pengelolaannya rendah. Kelemahan : sumber daya keuangan yang terbatas pada harta milik pribadi. Contoh : bengkel, rumah makan, binatu.
2. Persekutuan (partnership) adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 atau lebih individu.
3. Korporasi (corporation) atau perseroan dibentuk berdasarkan pemerintah sebagai suatu badan hukum yang terpisah. Kepemilikan dalam korporasi terbagi dalam lembar saham atau sero. Kelebihan : kemampuan untuk mendapatkan sejumlah besar sumber daya dengan menerbitkan saham.

Perusahaan dengan kewajiban terbatas (limited liability corporation) menggabungkan karakteristik persekutuan dan korporasi. Artinya perusahaan dikelola seperti sebuah korporasi tetapi dapat dikenakan pajak layaknya sebuah persekutuan. Tanggung jawab pemilik terbatas pada nilai investasinya di perusahaan dan penghasilannya hanya dikenai pajak saat ia melaporkannya dalam laporan pajak pribadi. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari sistem akuntansi umum. Agar dapat memahami laporan keuangan, perlu dimengerti terlebih dahulu kerangka akuntansi umum.

Kerangka Teori Akuntansi Umum

Tujuan Akuntansi

Tujuan utama akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Dari segi akuntansi umum, titik beratnya adalah laporan untuk pihak-pihak diluar perusahaan, tujuan ini dicapai dengan mengeluarkan laporan keuangan. Laporan keuangan haruslah merupakan laporan yang serba guna karena pihak pemakai laporan keuangan diluar perusahaan banyak sekali dan masing-masing mempunyai maksud yang berbeda. Karena pemakai laporan keuangan berbeda-beda maka pendekatan yang paling baik dalam penyusunan laporan keuangan adalah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

Di Indonesia prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum telah dihimpun/dikodifikasikan dalam Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia.

Asumsi Akuntansi

Suatu teori selalu diciptakan atas dasar asumsi-asumsi tertentu. Asumsi merupakan kerangka dasar dari pembentukan teori tersebut. Asumsi merupakan kebenaran mutlak yang harus diterima, agar dengan proses logika, teori yang bersangkutan dapat mengambil kesimpulan. Ada tujuh asumsi yang mendasari teori akuntansi umum :

1. Kesatuan usaha yang terpisah (specific separate entity)
2. Kelangsungan hidup perusahaan (going concern)
3. Uang sebagai alat pengukur (money measuring unit)
4. Biaya historis (historical cost)
5. Pembagian akuntansi dalam periode-periode (periodicity)
6. Pengakuan pendapatan (revenue recognition)
7. Pertemuan pendapatan dan biaya (matching cost against revenue)

Terdapat hubungan yang erat antara tujuan dan asumsi akuntansi. Asumsi-asumsi yang dipakai akan menentukan tujuan yang dapat dicapai. Demikian juga sebaliknya.

Kesatuan Usaha yang Terpisah

Suatu kesatuan usaha adalah unit khusus yang melakukan kegiatan ekonomis. Kesatuan usaha tersebut dapat berupa bentuk-bentuk usaha tertentu (perseroan terbatas, perusahaan perorangan/proprietorship, persekutuan/partnership), bagian usaha tertentu (divisi, departemen, dsb), kelompok perusahaan tertentu yang beroperasi dibawah satu kontrol atau organisasi-organisasi nonprofit tertentu yang melakukan kegiatan ekonomis. Dalam akuntansi umum, yang dimaksud kesatuan usaha adalah bentuk usaha tertentu.

Perusahaan Berjalan

Kecuali ada bukti-bukti yang mengatakan sebaliknya, laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa perusahaan akan berjalan terus sampai pada

waktu yang tidak dapat ditentukan. Hal ini tidak berarti bahwa dapat dipastikan perusahaan akan berdiri terus sepanjang waktu, tetapi asumsi ini berarti bahwa perusahaan akan tetap berdiri dalam jangka waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan rencana-rencana jangka pendeknya dan memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Uang Sebagai Alat Pengukur

Para akuntan menganggap bahwa uang merupakan alat pengukur yang paling baik untuk harta dan hak kekayaan perusahaan (equity's) beserta perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya. Asumsi ini membawa akibat bahwa laporan keuangan hanya memuat kegiatan-kegiatan yang dapat diukur dengan uang.

Biaya Historis

Kecuali untuk penyimpangan-penyimpangan yang telah diterima umum dan untuk harta-harta yang bersifat uang, seperti misalnya kas, surat-surat berharga dan piutang, akuntan mengasumsikan bahwa biaya (harga perolehan) biasanya merupakan dasar pengukuran yang baik pada saat harta tersebut diperoleh, digunakan atau dipertukarkan.

Pembagian Akuntansi dalam Periode-Periode (Fiskal)

Informasi keuangan harus diberikan secara berkala. Oleh karena itu, para akuntan akan membagi jangka waktu hidup perusahaan tersebut kedalam periode tertentu, dimana secara berkala akuntan akan menyajikan informasi keuangan kepada pimpinan perusahaan. Penyusunan laporan keuangan tahunan (yang biasanya dilakukan oleh perusahaan) merupakan aplikasi dari asumsi ini.

Konsep Pengakuan Pendapatan

Pendapatan (revenue) adalah penjualan barang dan jasa yang telah dinyatakan dalam uang. Pendapatan juga merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus. Untuk tujuan pencatatan dan laporan dalam akuntansi diperlukan pembatasan yang jelas tentang kapan suatu pendapatan diakui sebagai pendapatan.

Konsep Penandingan Pendapatan dan Biaya

Konsep ini berarti bahwa biaya-biaya yang dibebankan pada suatu periode akuntansi tertentu haruslah hanya biaya-biaya yang dipergunakan untuk memperoleh pendapatan pada periode yang sama.

Doktrin Akuntansi

Doktrin akuntansi (accounting doctrine) adalah sikap (ide-ide) normatif yang dalam profesi akuntansi dianggap sebagai praktik akuntansi yang baik (normative attitudes of the accounting profession as to what ought to represent good accounting practice). Yang termasuk dalam doktrin akuntansi adalah materialitas (materiality), konsistensi (consistency), komparatif (comparability), obyektivitas (objectivity), dan konservatif (conservative).

Materialitas

Doktrin materialitas mengatakan bahwa akuntan tidak perlu melaporkan apakah kejadian-kejadian ekonomi tertentu telah mengikuti teori-teori akuntansi, apabila pengaruhnya terhadap ketepatan laporan keuangan tidak berarti. Masalah kapan suatu kejadian dianggap material atau tidak, banyak tergantung pada penilaian akuntan. Statement No. 4 yang dikeluarkan oleh American Institute of Certified Public Accountant mendefinisikan materialitas sebagai berikut : “Financial reporting is only concerned with information that is significant enough to affect evaluation or decisions”.

Konsistensi

Doktrin konsistensi menyatakan bahwa prosedur akuntansi yang digunakan oleh suatu kesatuan usaha harus sama dari suatu periode ke periode berikutnya. Doktrin konsistensi diperlukan karena adanya alternatif prosedur-prosedur yang masing-masing diterima dalam praktik. Doktrin konsistensi dimaksudkan agar dalam analisa komparatif, penyimpangan yang terdapat dalam laporan keuangan hanya disebabkan oleh perubahan-perubahan keadaan ekonomis bukan disebabkan oleh perubahan aplikasi prosedur akuntansi. Doktrin konsistensi tidak berarti bahwa dalam penyusunan laporan keuangan tidak diperkenankan adanya perubahan prinsip-prinsip atau prosedur akuntansi.

Perbandingan

Doktrin perbandingan mengatakan bahwa laporan keuangan dari perusahaan yang berbeda harus didasarkan pada prinsip dan prosedur akuntansi yang sama, sehingga akan memudahkan bagi pembaca laporan keuangan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan diantara perusahaan-perusahaan tersebut.

Obyektivitas

Dalam praktik akuntansi, doktrin obyektivitas mengatakan bahwa ukuran-ukuran (accounting measurement) harus didasarkan pada bukti-bukti yang dapat diperiksa.

Konservatif

Doktrin konservatif dalam akuntansi dinyatakan dengan ”mengakui adanya biaya apabila diharapkan akan terjadi dan mengakui pendapatan hanya apabila ia telah direalisasi”. Apabila ada beberapa alternatif, maka akuntan akan memilih alternatif yang paling jelek akibatnya terhadap kekayaan pemilik perusahaan. Apabila akuntan harus memilih dua nilai yang tersedia untuk harta, maka ia akan memilih nilai yang terendah (untuk hutang sebaliknya).

Prinsip-Prinsip Akuntansi

Prinsip-prinsip akuntansi merupakan pedoman umum yang dipergunakan dalam praktik akuntansi. Prinsip-prinsip tersebut biasanya dikeluarkan oleh badan-badan yang diakui oleh pemerintah, misalnya American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) di Amerika Serikat. Di Indonesia satu-satunya organisasi akuntan adalah Ikatan Akuntan Indonesia.

Terkadang suatu prosedur, cara-cara, dan metode-metode akuntansi yang diterapkan dalam suatu perusahaan juga ditentukan oleh peraturan-peraturan perpajakan. Laporan keuangan yang akan ditujukan untuk pajak harus mengikuti pedoman yang terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108/KMK.07/1979 tanggal 2 Maret 1979. Dalam surat keputusan ini disebutkan bahwa laporan keuangan yang ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak harus disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia.

Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah neraca dan perhitungan laba-rugi serta segala keterangan-keterangan yang dimuat dalam lampiran-lampirannya antara lain laporan sumber dan penggunaan dana. Keterangan-keterangan tambahan yang dimaksud dalam laporan keuangan adalah

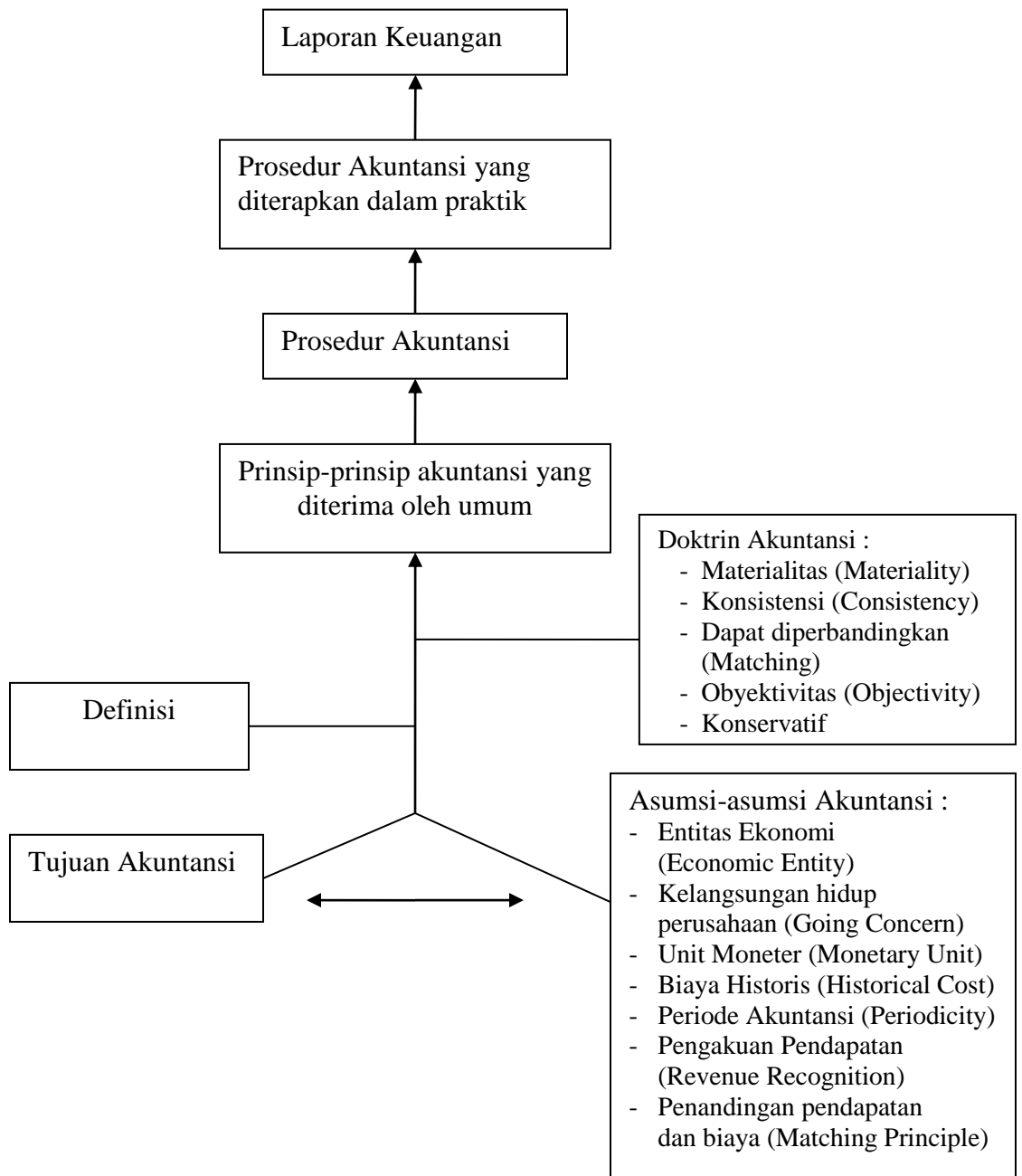
1. kondisi dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi.
2. usaha-usaha yang lalu, sekarang maupun yang akan datang.
3. luasnya produksi.
4. kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan.
5. penelitian dan pengembangan.
6. marketing dan advertising.
7. rencana-rencana dalam belanja modal dan pembelanjaan dimasa-masa yang akan datang.
8. kebijaksanaan mengenai dividen.

Keterangan tambahan diatas hanya berlaku untuk perusahaan besar yang pemegang sahamnya banyak dan tidak merupakan suatu keharusan. Pertanggungjawaban pimpinan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk laporan hanya sampai pada : “Penyajian secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha dalam suatu periode sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dilaksanakan secara konsisten”.

Pernyataan diatas berarti bahwa laporan keuangan utama yang harus disajikan oleh pimpinan perusahaan adalah neraca dan perhitungan laba rugi.

Dalam Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Emisi Efek yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Pasar Modal, yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Ikhtisar Perubahan Posisi Keuangan
6. Ikhtisar Harga Pokok Barang yang Diproduksi dan Dijual
7. Segala Penjelasan/catatan dan daftar-daftar lainnya.



Gambar
Kerangka dasar teori akuntansi

Daftar Pustaka

Abdul Halim, “Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah”, Penerbit Salemba Empat, 2002.

Abdul Halim, “Akuntansi Keuangan Daerah”, Penerbit salemba Empat, 2004.

Indra Bastian, “Akuntansi Sektor Publik di Indonesia”, Penerbit Andi Yogyakarta, 2001.

Mardiasmo, “Akuntansi Sektor Publik”, Penerbit Andi Yogyakarta, 2002.

Mardiasmo, “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”, Serial Otonomi Daerah, good governance, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 24, “Standar Akuntansi Pemerintahan”, 2005.

Komite Good Corporate Governance, “Pedoman Good Corporate Governance”, 2008.